

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi politik yang dimulai dengan runtuhnya kekuasaan orde baru oleh para mahasiswa terimplementasi oleh perubahan UUD 1945 oleh MPR RI. Perubahan tersebut dilakukan semenjak tahun 1999 s/d 2002 dalam satu kali perubahan. Amandemen UUD 1945 dilakukan merespon tuntutan rakyat yang telah tertekan selama 32 tahun masa orde baru. Nuansa kebatinan rakyat Indonesia yang turut mewarnai para perumus perubahan undang-undang dasar tersebut antara lain tuntutan dihapuskannya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), penghapusan dwi fungsi ABRI serta pemisahan TNI dan POLRI, pembatasan masa jabatan Presiden, serta dilaksanakannya otonomi daerah sebagai antitesa dari sentralisasi pemerintahan pada jaman Orde Baru berkuasa selama lebih dari 32 tahun.

Runtuhnya masa orde baru ditandai oleh tingginya partisipasi politik terutama dikalangan mahasiswa maupun masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam sistem perpolitikan di negara indoneisa. Partisipasi politik dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan warga dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan politik. Partisipasi politik ini dilakukan warga mengingat posisinya sebagai anggota masyarakat dan menjalankannya dengan sukarela, bukan dimobilisasi oleh pejabat politik ataupun partai yang berkuasa.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain. Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas.

Setiap warga negara khususnya mahasiswa sudah sepatutnya memerhatikan kehidupan politik negaranya. Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang berdasarkan keilmuannya itu semestinya dapat melihat segala kemungkinan yang terjadi dari penyelenggaraan negara disemua bidang. Mahasiswa bisa menawarkan solusi dan kritisasi terhadap penyelenggaraan negara berdasarkan kompetensinya sebagai komunitas intelektual atas dasar kepeduliannya terhadap kondisi kehidupan politik bangsa ini. Mahasiswa adalah kelompok masyarakat dengan budaya politik partisipan, oleh karena itu mahasiswa harus aktif mengikuti perkembangan politik bangsa ini dan menjadi ujung tombak dalam perjuangan politik masyarakat.

Peran dan posisi mahasiswa dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan diskursus yang menarik sepanjang dinamika kehidupan mahasiswa. Hampir menjadi kenyataan yang lazim bahwa gerakan mahasiswa terutama di dunia ketiga memainkan peran yang sangat aktif pada posisi sentral di dalam perubahan sosial-politik, dan hampir tak satupun penguasa di negara-negara berkembang yang mengabaikan posisi sosial dan pentingnya representasi politik serta dampak aspirasi dari golongan muda berpendidikan tinggi ini, sehingga para pemerhati sosial tidak mengabaikan fungsi mereka dalam sistem sosial politik baik di negeri maju maupun berkembang, termasuk di Indonesia.

Menurut Salim (2010) peran mahasiswa sebagai agen perubahan setidaknya di tunjukan oleh beberapa peran yang dimiliki diantaranya :

1. Peran dalam memperdalam dan mengembangkan diri di dalam pembedangan keilmuan yang ditekuninya sehingga dapat memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab intelektualnya.
2. Merupakan jembatan antara dunia teoritis dan dunia empiris dalam arti pemetaan dan pemecahan masalah-masalah kehidupan sesuai dengan bidangnya.
3. Merupakan dinamisator perubahan masyarakat menuju perkembangan yang lebih baik (agen perubahan).
4. Mahasiswa merupakan kontrol terhadap perubahan sosial yang sedang dan akan berlangsung.

Kurangnya keinginan mahasiswa untuk terjun ke politik tandai oleh mulai apatisnya mahasiswa terhadap kehidupan politik. Menurut Juneman Abraham dan Diantini Ida Viatrie (2013) yang memperlihatkan perilaku apatisma mahasiswa dalam kehidupan politik di tunjukan oleh beberapa contoh, diantaranya :

- a. Mahasiswa tak berminat belajar ilmu politik.
- b. Mahasiswa menganggap "bikin pusing saja" jika menjadi anggota senat atau badan eksekutif mahasiswa.

- c. Mahasiswa yang “melekipolitik” pun tidak mempraktekan ilmu politiknya dengan penelitian dan partisipasi politik
- d. Mahasiswa yang sudah tergabung dalam senat atau badan eksekutif mahasiswa pun menarik diri dari organisasi tersebut karena “bosan” terhadap perdebatan.
- e. Mahasiswa kurang berminat mengubah kondisi masyarakat melalui organisasi kemahasiswaan.

Perilaku mahasiswa yang demikian apatis terhadap dunia politik pada akhirnya akan dilihat pada saat kelulusan mahasiswa yang menjadi pertarungan kemana mahasiswa akan melangkah. Beberapa jawaban yang disampaikan oleh mahasiswa yang telah menempuh kelulusan pada perguruan tinggi adalah kebanyakan dari lulusan perguruan tinggi merasa bingung akan melanjutkan kemana dan mau kerja dimana (<https://id.berita.yahoo.com/ketika-para-sarjana-kebingungan-mencari-pekerjaan.html> di akses pada tanggal 8 Oktober 2014). Gelar keserjanaan pada perguruan tinggi ternyata bukan salah satu jaminan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran sarjana atau lulusan universitas pada bulan Februari 2013 mencapai 360 ribu orang atau 5,04% dari total pengangguran yang mencapai 7,17 juta orang. (<http://www.finance.detik.com/read/sarjana-di-indonesia-masih-menganggur> di akses pada tanggal 3 September 2014).

Beberapa hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap keinginan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk berkarir di partai politik setelah mereka lulus adalah mahasiswa beranggapan bahwa partai politik adalah salah satu tempat pelaku korupsi dan akan menciptakan aktor aktor korupsi. Di samping itu juga partai politik hanya sekedar untuk mencari keuntungan sebesar besarnya dari hasil keuangann negara. Akan tetapi disatu sisi

mahasiswa juga berpendapat bahwa partai politik adalah salah wadah tempat berkumpul untuk merumuskan kebijakan dan sebagai tempat menyalurkan aspirasi (hasil observasi peneliti dengan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Berdasarkan penjelasan di atas setidaknya kita dapat memberikan sebuah penalaran, bahwasannya mahasiswa yang memilih sebuah program studi yang tepat, yang mana memiliki kemampuan dan dapat memprediksikan masa depan apakah nantinya prospek ataukah tidak melalui peluang kerja yang ada. Akan tetapi yang perlu diketahui lebih dalam lagi adalah terkait dengan motif dan inisiatif personal dari mahasiswa yang mengambil sebuah jurusan tertentu, apakah dengan jurusan tersebut nanti akan di proyeksikan menjadi sebuah gambaran kerja yang sejalan dengan kemampuan akademisnya atau mungkin pada akhirnya nanti akan di arahkan kepada pekerjaan yang kontras dengan kompetensi yang dimilikinya (Ragil, 2012).

Dalam pengambilan sebuah keputusan terutama dalam hal pemilihan sebuah jurusan, komponen yang harus dipahami sebelumnya adalah kualifikasi seperti apa yang nantinya dibutuhkan oleh dirinya dalam menyiapkan tantangan kerja. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan pemilihan atau pengambilan sebuah jurusan merupakan gambaran nantinya setelah mereka menempuh perkuliahan dan akan siap masuk kedalam dunia kerja, yang lebih jauh lagi adalah dimana mereka akan nantinya bekerja merupakan gambaran perilaku dengan keterlibatan tinggi.

Proses pengambilan sebuah keputusan akan melibatkan faktor internal seperti kepribadian, persepsi, motivasi, sikap (pembelajaran), dan faktor eksternal seperti perspektif keluarga, teman, tetangga, saudara, dan lain sebagainya (norma subyektif), kemudian diintegrasikan dengan kontrol berperilaku yang dirasakan (*perceived control behavior*) yaitu suatu kondisi bahwa orang percaya tindakan itu mudah atau sulit untuk dilakukan (Zaiyad H. dan Tjahjono, 2007: 50).

Theory of planned behavior (teori perilaku terencana) adalah teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang awalnya teori ini merupakan bentuk *Theory Reasoned Action* (teori aksi rasional). Teori ini awalnya memiliki dua variabel yakni sikap dan norma subyektif. Akan tetapi, dengan pengembangan dari teori ini menemukan satu variabel tambahan yang mempengaruhi niat yakni kontrol berperilaku yang dimiliki oleh seseorang (Ajzen, 2005)

Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang jika dikaitkan dengan teori ini adalah sama halnya ketika seseorang menajutuhkan pilihan pada jurusan terutama dalam pengambilan program studi Ilmu Pemerintahan. Pengambilan sebuah keputusan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan apakah dari motivasi yang menjadikan pembelajaran dalam melihat kondisi yang terjadi pada masa sekarang ini (sikap) seperti adanya prediksi terhadap peluang kerja yang ada ataupun terhadap prospek Jurusan perkuliahan yang akan ditempuh yang nantinya akan menunjang atau malah sebaliknya. Dalam proses pengambilan keputusan, interpretasi dan pengaruh dari orang-orang sekitar seperti anggota keluarga, teman, lingkungan sekitar akan ikut memberi pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Pengaruh-pengaruh ini nantinya akan ikut memberikan rekomendasi

ataupun pandangan terhadap langkah yang diambil, apakah pengaruh ini akan mendukung proses pemilihan sebuah jurusan atukah tidak. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah pada proses kontrol keperilakuan yang dirasakan, apakah jurusan yang diambil nantinya merupakan pilihan yang tepat bagi dirinya dikemudian hari nanti, kemudian pemilihan jurusan yang diambil kedepannya akan mudah dijalani atau tidak.(ragil, 2012)

Dalam upaya pembentukan niat, peneliti termotivasi untuk menjadi jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai objek penelitian untuk mengetahui dan mengeksplorasi masalah yang sejalan terhadap topik. Prospek karir yang ditawarkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan sangat memungkinkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang telah menempuh sarjana sangat mungkin terjun dalam dunia politik. Hal ini di tuangkan kedalam tujuan Program Studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yakni sebagai berikut :

- a. Terwujudnya alumni yang memiliki kompetensi teoritik dan teknis di bidang pemerintahan yang berstandar nasional dan internasional yang memiliki nilai-nilai dasar Islam yang kuat.
- b. Terwujudnya karya-karya civitas akademika dalam publikasi nasional dan internasional yang berguna bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan.
- c. Terwujudnya pengabdian yang memiliki kemanfaatan bagi *stakeholders* pemerintahan dan masyarakat.(di akses pada <http://ip.umy.ac.id/about-the-department/vision-mission> tanggal 16 Oktober 2014).

Lulusan Jurusan Ilmu Pemerintahan akan disiapkan untuk mempunyai kompetensi utama yakni sebagai birokrat, politisi dan akademisi/peneliti (Borang Akreditasi Jurusan Ilmu Pemerintahan)

Idealitas di atas sebetulnya telah tersurat jelas dalam pasal 3 SK Mendiknas No 232/U/2000 tentang arah PT Program sarjana diarahkan menjadi lulusan yang memiliki kualifikasi menguasai dan menerapkan nilai nilai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan pada bidang keahliannya, mampu memahami dan menyelesaikan masalah dalam kawasan keahliannya untuk kegiatan produktif dan bermanfaat bagi kehidupan bersama.

Melihat kondisi di atas peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut peneliti terinspirasi untuk melihat lebih lanjut penelitian ini dengan judul. **“Pengaruh Sikap, Norma Subyektif dan Kontrol Keperilakuan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Terhadap Perilaku Mahasiswa Untuk Berjenjang Karir di Partai Politik ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh sikap (*attitude*) terhadap perilaku mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan untuk berjenjang karir di partai politik ?
2. Bagaimana pengaruh norma subyektif (*subjective norm*) terhadap niat berperilaku mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan untuk berjenjang karir di partai politik ?
3. Bagaimana kontrol berperilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) terhadap niat berperilaku mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan untuk berjenjang karir di partai politik ?
4. Bagaimana pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku terhadap niat berperilaku mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk berkarir di partai politik ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap (*attitude*) mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk berjenjang karir di partai politik
2. Untuk mengetahui norma subyektif (*subjective norm*) mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk berjenjang karir di partai politik
3. Untuk mengetahui mengetahui kontrol berperilaku persepsian mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk berjenjang karir di partai politik

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sikap, norma subyektif dan perilaku kontral persepsian mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk berjenjang karir di partai politik

b. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini di harapkan dapat membawa manfaat baik dari segi akademik maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakaan dan sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang telah dipelajari sehingga selain berguna dalam mengembangkan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi jurusan Ilmu Pemerintahan untuk menyiapkan lulusan Ilmu Pemerintahan yang siap berkarir di dunia politik.

D. Kerangka Dasar Teory

1. Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sangatlah akrab dengan lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai politik buka sesuatu yang dengan sendirinya ada. Miriam budiharjo (2007:403) memberikan pengertian terhadap partai politik bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai

nilai dan cita cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.

Menurut Carl J. Friedch (1967:419) menyatakan bahwa partai politik sebagai berikut :

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir, stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemererintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil (*A political, party is grup of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefit and advantages*).

Secara modern, partai politik menurut Ichlul Amal (2012:15) dapat di definisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon oleh rakyat, sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan tindakan pemerintah.

Berikut ini teori partai politik menurut para ahli :

1. Mark N. Hangopian dalam Ichlasul Amal (2012), mendefinisikan partai politik adalah suatu organisasi yang di bentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakteristik kebijakan publik publik, dalam rangka prinsip prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.
2. Sigmunt Neumann dalam Inu Kencana Syafiie dan Azhari (2010:78), mendefinisikan partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan kekuasaan pemerintahan, serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golonga golongan lain yag mempunyai pandangan yang berbeda

3. Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta pemeliharaan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
3. Menurut Sigit pamungkas (2005: 5), mendefinisikan partai politik adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan, dan kekuasaan itu di peroleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum.

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai fikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa di konsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Dengan melihat gambaran mengenai partai politik diatas maka sarana untuk aspirasi rakyat kepada pemerintah tentunya melalui partai politik. Akan tetapi perlu di mengerti, bahwa partai politik itu merupakan organisasi yang ada dalam suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, dengan cara menempatkan para wakilnya untuk duduk di lembaga tinggi negara.

Dalam struktur partai politik ideal keberadaan partai politik memiliki fungsi politik. Menurut Meriam Budiardjo (2007:405) fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai berikut :

a. Sebagai sarana komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan. Agregasi kepentingan adalah proses untuk menampung dan menggabungkan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Kemudian artikulasi kepentingan adalah proses pengelolaan dan perumusan pendapat dan aspirasi kedalam bentuk yang lebih teratur.

b. Sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik”, yaitu nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses sosialisasi politik berjalan seumur hidup, berkembang mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, pengalaman oran dewasa, oraganisasi keagamaan, dan partai politk.

c. Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi ini sangat erat kaitannya dalam proses seleksi kepemimpinan dalam di dalam tubuh partai bahkan sampai kepemimpinan di dalam tubuh partai bahkan sampai kepemimpinan nasional. Partai politik membutuhkan kader-kader partai yang bekerja dengan baik untuk memperjuangkan kepentingan partai.

d. Sebagai sarana pengatur konflik

Dalam kehidupan masyarakat perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang wajar. Namun dalam situasi masyarakat yang juga heterogen sifatnya ini, perbedaan pendapat terkadang pematik timbulnya konflik. Peran dari partai politik sangat di perlukan untuk mengatasi permasalahan ini. sekurang kurangnya mampu untuk mengatur konflik sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat di tekan seminimal mungkin.

Adapun fungsi partai politik dalam Undang-undang No 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 adalah sebagai berikut :

Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar warga negarai Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Penciptaan iklim yang kundusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
2. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
3. Partisipasi politik warga negara Indonesia
4. Rekrutimen politk dalam proses pengisiiian jabawatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender.

2. Perilaku

Psikologi memandang perilaku manusia (*human behavior*) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan : berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan).

Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika (http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_manusia). Perilaku memiliki pengertian adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. (<http://deslanikn.blogspot.com/2011/07/teori-perilaku-psikologi.html>). Perilaku yang berlaku pada individu atau organisme tidak timbul dengan sendirinya. Tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan. Baik itu stimulus eksternal maupun stimulus internal (Walgito, 1991).

3. Theory Of Planned Behavior

Manusia biasanya berperilaku dengan cara yang masuk akal, mereka mempertimbangkan perilakunya berdasarkan informasi yang tersedia, dan secara

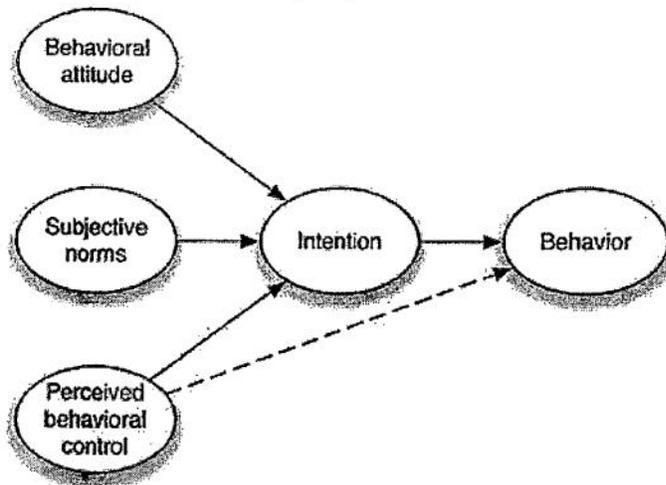
implisit atau eksplisit juga mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka (Ajzen, 2006). Menurut Grizzell (2003) *Theory Of Planned Behavior* adalah *Theory Of Reasoned Action* yang disempurnakan dengan penambahan *Perceived Behavior Control*. *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang meramalkan pertimbangan perilaku karena perilaku dapat dipertimbangkan dan direncanakan. Kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh beberapa peneliti yang menyatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* memiliki keunggulan dibandingkan teori keperilakuan yang lain, karena *Theory of Planned Behavior* merupakan teori perilaku yang dapat mengidentifikasi keyakinan seseorang terhadap pengendalian atas sesuatu yang akan terjadi dari hasil perilaku, sehingga membedakan antara perilaku seseorang yang berkehendak dan yang tidak berkehendak (dalam Ficky Dima Nuary 2010). Ajzen (2002) mengemukakan bahwa *Theory of Planned Behavior* telah muncul sebagai salah satu dari kerangka kerja yang paling berpengaruh dan konsep yang populer pada penelitian di bidang kemanusiaan. Menurut teori ini, perilaku manusia dipandu oleh 3 jenis pertimbangan:

1. Kepercayaan perilaku (*behavioral belief*), yaitu kepercayaan tentang kemungkinan terjadinya perilaku. Kepercayaan perilaku akan menghasilkan suatu sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku.
2. Kepercayaan normatif (*normative belief*), yaitu kepercayaan tentang ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi tersebut. Kepercayaan normatif menghasilkan tekanan sosial atau norma subyektif.

3. Kepercayaan kontrol (*control belief*), yaitu kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut. Kepercayaan kontrol akan menghasilkan kontrol perilaku persepsian.

Dengan kata lain, *Theory Of Planned Behavior* merupakan teori pengembangan dari *Theory Of Reasoned Action*. Sejalan dengan hal tersebut, East, (1997) menyebutkan bahwa *Theory Of Planned Behavior* diturunkan dari *Theory Of Reasoned Action*, dengan perbedaannya yaitu ditambahkan variabel *Perceived Behavior Control* pada kerangka penelitian.

Gambar 1.1
Theory Planned Behavior



Sumber : Ajzen (2005)

Niat (*intention*) didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Niat tidak selalu statis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu (Jogiyanto, 2008). Niat merupakan inisiatif personal yang mencerminkan adanya kemauan

untuk melakukan sebuah tindakan. Niat erat kaitannya dengan motivasi, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Niat yang baik akan mendorong timbulnya motivasi untuk berbuat baik. Tindakan yang baik akan memberikan hasil yang baik pula dan jika terus diulang akan terinternalisasi dan *persistent* dalam diri seseorang sehingga tercipta pribadi dengan perilaku yang baik, begitu pula sebaliknya (Suharto, 2008 dalam Miladia, 2010). Niat tidak selalu statis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu sehingga dapat disimpulkan semakin lebar interval waktu, semakin mungkin terjadi perubahan pada niat (Jogiyanto, 2008).

Theory Planned Behavior yang di kembangkan oleh Ajzen akan mengeksplorasi serta melihat kepada tiga faktor pembentuk niat dalam berperilaku yakni : (1) Sikap (*Attitude*), (2) Norma Subyektif (*Subjective Norm*), (3) kontrol keprilkuan yang di rasakan (*Perceived Control Behavior*).

a. Sikap (*attitude*)

Sikap terhadap suatu perilaku mengacu pada tingkat seseorang mengevaluasi suatu perilaku itu baik atau tidak baik, dan dapat pula dikatakan penelitian seseorang terhadap suatu perilaku (Ficky Dima Nuary, 2010). Sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward behavior*) ditentukan oleh keyakinan terhadap suatu perilaku (*behavior beliefs*) dan biaya atau keuntungan dari perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Sikap yang dimaksud termasuk perasaan tentang sesuatu yang ingin dicapai dari perilaku yang dia lakukan (Sharma *et. al.*, 2003) .

Ajzen (2001) di kutip dalam Dewi Sulistiyana (2012) mendefinisikan sikap (*attitude*) sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak, dan (*belief*) atau perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan

Sikap merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluative mengenai objek, orang, atau peristiwa (Robin, 1998). Jadi sikap berarti suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan neural (pikiran) yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek, yang diorganisir melalui pengalaman serta pengaruh secara langsung dan atau secara tidak langsung. Sikap biasanya memainkan peran utama dalam membentuk perilaku. Sikap juga dipandang sebagai keseluruhan evaluasi (Engel *et. al.*, 1995)

Menurut Assael (2001) sikap di definisikan sebagai kecenderungan yang di pelajari untuk memberikan respon kepada objek atau kelas objek secara konsisten baik dalam rasa suka maupun tidak suka. Sedangkan menurut Mowen dan Minor (2002) sikap merupakan afeksi atau perasaan terhadap sebuah rangsangan.

Menurut Mowen dan Minor (2002) dalam kita melihat sikap terdapat tiga komponen penentu sikap di antaranya :

a. Komponen kognitif (berfikir)

Kognitif merupakan proses mental pemikiran seseorang, dengan fungsi utamanya adalah menginterpretasikan, memberi makna dan memahami aspek utama pengalaman mereka

b. Komponen afektif (perasaan)

Komponen afektif merupakan phenomena kelas mental secara unik di karakteristik oleh pengalaman yang di sadari, yaitu perasaan subyektif yang biasa muncul secara bersama-sama dengan emosi dan suasana hati.

c. Komponen Konotatif

Komponen ini merupakan komponen sikap yang berhubungan dengan kemungkinan atau kecendrungan individu atau melakukan tindakan khusus atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek tertentu.

Penentuan sikap dalam hal mempengaruhi perilaku dapat di timbulkan oleh dimensi keyakinan dan evaluasi. Perumusan sebuah sikap melalui model Fishebein sebagai berikut (Setiadi 2003:221) :

$$A_o = \sum_{i=1}^N b_i \cdot e_i$$

Dimana : A_o = Keseluruhan sikap terhadap objek

b_i = Apakah kepercayaan terhadap atribut I suatu objek kuat atau tidak

e_i = Evaluasi kebaikan atau kejelekan atribut I

N = Jumlah Kepercayaan

b. Norma Subyektif (*subjective norm*)

Norma subyektif adalah tekanan sosial yang dirasakan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam perilaku. Menggambar analogi dengan model harapan-nilai

sikap, diasumsikan bahwa norma subyektif ditentukan oleh total seperangkat kepercayaan normatif diakses mengenai harapan-harapan

Norma subyektif (*subjective norm*) yang berupa penentu kedua dari niat, juga diasumsikan sebagai suatu fungsi kepercayaan yaitu kepercayaan seseorang bahwa individu-individu tertentu atau kelompok-kelompok menyetujui atau tidak menyetujui melakukan suatu perilaku (dalam Dewi Sulistiani,2012)

Menurut Sri Raharso (2008:101) menyatakan bahwa norma subyektif merupakan persepsi yang bersifat individual terhadap tekanan sosial untuk melakukan/ tidak melakukan perilaku tertentu. Norma subyektif dapat ditentukan dan di ukur sebagai suatu kumpulan keyakinan normatif mengenai kesetujuan/ketidak setujuan acuan yang signifikan terhadap perilaku. Norma subyektif muncul akibat adanya kelompok-kelompok yang mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok-kelompok bisa terdiri dari dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap pendirian seseorang. Kelompok ini merupakan sekumpulan orang yang hidup dan saling berinteraksi dalam lingkungan sekitar. Salah satu kelompok ini adalah kelompok primer seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, rekan organisasi yang mana orang tersebut akan cenderung untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka. Di samping itu juga kelompok-kelompok sekunder seperti kelompok keagamaan, profesi dan kelompok asosiasi perdagangan yang mana cenderung akan bersifat lebih formal dan membentuk koneksi yang tidak begitu rutin (Setiadi, 2003:266)

Norma subyektif sebagai salah satu indikator terbentuknya perilaku seseorang secara spesifik menimbulkan beberapa dimensi di antaranya dimensi keyakinan normatif dan kemauan menuruti orang lain (Medyarti, 2009:17). Skema formulasi yang dapat di bentuk pada penelitian ini adalah sebagai beriku (medyarti, 2009:17) :

$$SN = \sum nbj.mcj$$

Yang mana :

SN = Norma Subyektif

n timer = Kenyakinan normatif

mcj = Motivasi menurut orang lain

Menurut Dharmmesta (1998) menyatakan bahwa norma subyektif adalah tekanan sosial yang dirasakan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perilaku. Norma subyektif tidak terlepas dari kegiatan melakukan keputusan untuk berperilaku. Menurut Ajzen (1991) menyatakan bahwa norma subyektif lebih mengacu pada pengertian tentang persepsi atas tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku.

b. Kontrol Perilaku (*Perceived Behavior Control*)

Selain *attitude toward the behavior* dan *subjective norm*, dalam *planned behavior theory* terdapat pula faktor individual, yaitu persepsi tentang kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Kontrol keperilakuan yang dirasakan merupakan kondisi pada saat orang percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan (Dharmmesta, 1998) dalam ficky (2010). Grizzell (2003)

menyebutkan bahwa *Perceived Behavior Control* hampir sama dengan konsep *self efficiency*, yaitu persepsi orang untuk kemampuannya pada saat melakukan tindakan atau perilaku. Secara konseptual, *perceived behavioral control* diharapkan untuk memoderasi pengaruh intensi pada perilaku yang dilakukan individu; sehingga suatu intensi yang kuat akan menghasilkan perilaku hanya jika *perceived behavioral control* yang dimiliki individu juga kuat.

Ajzen (2006) menyatakan bahwa intensi dan *perceived behavioral control* adalah berpengaruh terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh individu, namun pada umumnya, intensi dan *perceived behavioral control* tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki kontrol penuh terhadap perilaku yang akan ditampilkannya (Nelson, Fishbein, & Stasson; dikutip dalam Abrams & Moura, 2001). Azwar (dikutip dalam Christanti, 2008) menambahkan, *perceived behavioral control* sangat penting artinya ketika rasa percaya diri individu sedang dalam kondisi yang rendah.

Ajzen (2006) memaparkan *perceived behavioral control* sebagai fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut sebagai *control beliefs*, yaitu *belief* individu mengenai faktor pendukung dan atau penghambat untuk melakukan suatu perilaku (*salient control beliefs*). *Belief* tentang faktor pendukung dan penghambat untuk melakukan suatu perilaku didasarkan pada pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga oleh berbagai faktor

lain yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan perasaan individu mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

Secara spesifik, dalam *planned behavior theory*, persepsi tentang kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku. *Perceived behavioral control* ditentukan oleh kombinasi antara *belief* individu mengenai faktor pendukung dan atau penghambat untuk melakukan suatu perilaku (*control beliefs*), dengan kekuatan perasaan individu akan setiap faktor pendukung ataupun penghambat tersebut (*perceived power control*).

Kontrol berperilaku yang di rasakan secara kontekstual lebih memfokuskan kebentuk antisipasi terhadap segala kemungkinan dengan mempertimbangkan keputusan berdasarkan realitas yang ada. variabel ini juga di posisikan secara terintegrasi terhadap sikap dan norma subyektif untuk nanti berbentuk sebuah niat berperilaku. ([www.wordpress.com/theory of planned behavior](http://www.wordpress.com/theory%20of%20planned%20behavior))

Secara umum, semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri mudah untuk melakukan perilaku tersebut; sebaliknya, semakin sedikit individu merasakan sedikit faktor pendukung dan banyak faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2006). Intensi untuk berperilaku dapat menjadi perilaku sebenarnya hanya jika perilaku tersebut ada di bawah kontrol individu yang bersangkutan. Individu

memiliki pilihan untuk memutuskan perilaku tertentu atau tidak sama sekali (Ajzen, 1991: 6).

Menurut dharmesta (1998) *Theory of Planned Behavior* memasukan pengaruh yang akan di proyeksikan muncul dari kontrol keperilakuan yang di rasakan untuk mencapai tujuan tujuan keperilakuan, meskipun tidak secara langsung menunjukkan besarnya kontrol yang ada dalam situasi tertentu. Kontril keperilakuan yang dirasakan terbentuk dari keyakinan kontrol terhadap tindakan dan akses ke faktor kontrol. Secara matematis, kontrol keperilakuan yang di rasakan dapat di uraikan dalam skema sebagai berikut (Medyarti,2009)

$$PC = \sum_{i=1}^n pi.ci$$

Dimana :

- PC = Kontrol keperilakuan yang dirasakan
- pi = Keyakinan kontrol terhadap tindakan, I
- ci = Akses ke faktor kontrol, I
- N = Jumlah kontrol keperilakuan yang di rasakan

Keyakinan kontrol (pi), yakni sebuah keyakinan dari keberadaan atau ketidak beradaan dari sumber sumber dan kesempatan yang di perlukan untuk menghasilkan perilaku. Sumber sumber tersebut akan di pengaruhi oleh beberapa faktor yang muncul dari dalam diri seseorang maupun faktor lain dari luar diri seseorang yang merupakan kontrol terhadap tindakan yang nantinya akan di lakukan. Faktor faktor tersebut di harapkan dapat di masukan kedalam faktor penunjang seperti kemampuan keuangan seseorang dan informasi yang di miliki seseorang (medyarti, 2009:19). Untuk akses kontrol (ci), menurut solihin (2003)

yaitu suatu penilaian dari berbagai sumber penting untuk mencapai tujuan (Medyarti, 2009:20)

E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Menurut Arikunto (1999:154) hipotesis merupakan dugaan yang menjadi jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang perlu diuji kebenarannya menggunakan hipotesis sebagai berikut:

1. H1: Sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) berpengaruh terhadap niat berperilaku mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan untuk berjenjang karir di partai politik.
2. H2: Norma subyektif (*subjective norm*) berpengaruh terhadap niat berperilaku mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan untuk berkarir di partai politik.
3. H3: Kontrol berperilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) berpengaruh terhadap niat berperilaku mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan untuk berjenjang karir di partai politik.
4. H4: Sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol berperilaku persepsian (*perceived behavioral control*) berpengaruh terhadap perilaku mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan untuk berjenjang karir di partai politik.

F. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah bahwa dalam tahap ini berusaha untuk dapat menjelaskan mengenai pembatasan pengertian suatu konsep dengan konsep yang lainnya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dengan demikian definisi konsepsional adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi dari hal-hal yang perlu diamati.

1. Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, tujuan, nilai, dan cita-cita yang sama dengan bertujuan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.

2. Sikap

Sikap adalah kondisi dari sebuah kesiapan mental dan moral untuk menilai baik atau buruk terhadap sebuah objek, penggunaan pengaruh yang terarah dan dinamis pada respon individu kesemua objek dalam situasi tertentu.

3. Norma Subyektif

Norma Subyektif adalah merupakan suatu upaya untuk mencakup pengaruh pengaruh-pengaruh non kesikapan pada niat dan implikasinya pada perilaku dengan menyertakan pada pertimbangan tekanan sosial yang dirasakan.

4. Kontrol berperilaku

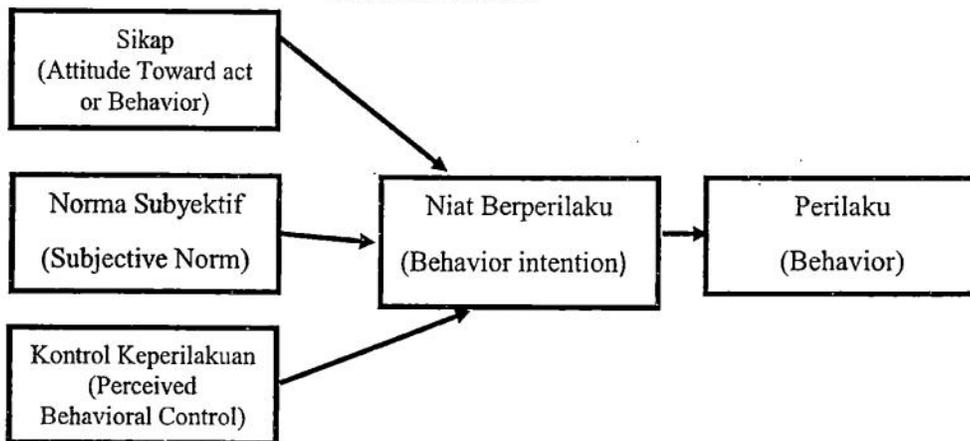
Kontrol berperilaku adalah suatu kondisi dimana individu percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan di bawah kontrol individunya.

5. Perilaku

Perilaku adalah suatu tindakan yang nyata yang dapat di respon dan di amati dalam situasi tertentu sehubungan dengan target yang di berikan.

Gambar.2.1

Skema Penelitian



G. Definisi Operasional

- a. Variabel dependen (terikat) adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Arikunto,1999:39). Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah Niat Berperilaku (Y). Niat berperilaku adalah tahapan kecenderungan bagi individu untuk melakukan tindakan sebelum keputusan untuk akan berperilaku benar benar di laksanakan. Indikator dalam penelitian ini adalah kesiapan mahasiswa untuk berkarir di partai politik.

b. Definisi variabel bebas (*Independent*) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah

1. Sikap (X1)

- a. Kepercayaan (keyakinan) untuk ikut dalam partai politik
- b. Kepercayaan emosional untuk berkarir partai politik

2. Norma Subyektif (X2)

- a. Keyakinan normatif
- b. Pertimbangan motivasi dari Lingkungan

3. Kontrol Keperilakuan (X3)

- a. Pengalaman pribadi
- b. Informasi yang diterima
- c. Akses terhadap partai politik

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara penelitian yang dapat dipakai oleh peneliti dalam menyelesaikan permasalahan. Harapannya dengan menggunakan metode-metode yang tepat dapat menjawab setiap permasalahan secara jelas dan pasti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Deskriptif adalah metode untuk menggambarkan atau mencari hubungan yang terdapat dalam suatu permasalahan.

2. Jenis Data

a. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara pengisian kuisioner bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

b. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari referensi-rerensi buku, laporan-laporan serta jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Unit Analisa

Unit analisa data dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2010, 2011, 2012 dan 2013. Alasan peneliti memilih jurusan Ilmu Pemerintahan UMY adalah status akreditasi A yang di miliki oleh Jurusan Ilmu Pemeritahan sudah di nobatkan semenjak tahun 2004 dan menurut Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasionl (BAN-PT) No 176/SK/Ban-PT/Akred/S/VI/2014 Jurusan Ilmu Pemerintahan mendapat status Akreditasi A sampai pada tahun 2019 (www.ban-pt.kemdiknas.go.id). Di samping berbicara dari segi status akreditasi Jurusan, Akreditasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Menurut Surat Keputusan No. 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 di berikan status Akreditas A (http://ban-pt.kemdiknas.go.id/hasil_aipt.php). Hal yang yang menjadikan ketertarikan lain bagi peneliti adalah jumlah mahasiswa yang di miliki oleh jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dari 4

tahun terakhir mengalami kenaikan peminatnya hal ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1
Jumlah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dari Tahun 2010-2013

Tahun Angkakatan	Jumlah Mahasiswa
Tahun 2010	152 Orang
Tahun 2011	180 Orang
Tahun 2012	252 Orang
Tahun 2013	382 Orang
Jumlah	966 Orang

Sumber : TU Jurusan Ilmu Pemerintahan 2014

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang akan di gunakan untuk mendapatkan data-data yang di perlukan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik-teknik sebagai berikut.

a. Teknik Kuisisioner

Penggunaan teknik kuisisioner dalam penelitian di gunakan untuk mengumpulkan data-data dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk di jawab oleh responden. Adapun responden yang di gunakan dalam penelitan ini adalaha mahasiswa dari Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang berisi informasi yang di butuhkan oleh penelitian dalam melakukan penelitian.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data penelitian dimana peneliti melakukan pengamatan, melihat fenomena-fenomena yang terdapat dalam penelitian.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah bagian dari atau anggota yang akan di amati. Populasi bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa, atau apapun yang nantinya menjadi survey penelitian (Eriyanto,2007:61). Dalam penelitian ini populasi yang di gunakan adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2010, 2011, 2012 dan 2013.

b. Sampel

Pengambilan sampel yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Stratified Random Sampling* (Sugiyono,2013:82), dikarenakan pelanggan yang menjadi populasi terbagi dalam strata/kelompok menurut angkatan, untuk kemudian digunakan teknik *Simple Random Sampling*, sehingga populasi dari tiap kelompok memiliki peluang yang sama untuk memberikan data yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu dilakukan pembagian secara proporsional.

Menurut Umar Husein (2005:108) untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik slovin dengan pembagian sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (10%) dan tingkat kepercayaan 90%

Jumlah populasi mahasiswa Ilmu Pemerintahan adalah 966 yang tersebar pada angkatan 2010, 2011, 2012 dan 2013. Berikut ini adalah perhitungan sampel penelitian :

$$n = \frac{966}{1 + 966(0,1)^2} = 90.619 \text{ (di bulatkan menjadi 91 orang)}$$

Teknik pengambilan sampel menggunakan satuan yang disebut *sample fraction (f)* untuk masing-masing sub populasi sebagai faktor pengalinya. Jumlah *sample fraction* disesuaikan dengan jumlah stratanya.

Nilai *f* dihitung melalui perhitungan sebagai berikut :

a. Besarnya *sampling fraction per-stratum* adalah :

$$f_i = \frac{N_i}{N}$$

b. Besarnya *sub sampling fraction per-stratum* adalah :

$$n_i = f_i \times n$$

Keterangan :

f_i = *sampling fraction stratum i*

N_i = banyaknya individu yang terdapat dalam stratum unsur Populasi.

N = banyaknya individu populasi seluruhnya

n = banyaknya anggota yang dimasukkan menjadi sampel

n_i = banyaknya anggota dimasukkan menjadi sub sampel per-stratum

Jumlah mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY angkatan 2010 sebanyak 152 orang, angkatan 2011 sebanyak 180 orang, angkatan 2012 sebanyak 252 orang dan angkatan 2013 sebanyak 382 orang. Dengan menggunakan rumus *sample fraction* maka di dapatkan sampel setiap angkatan yakni

a. Untuk angkatan 2010.

$$F_i = \frac{152}{966} = 0,157$$

Maka jumlah *sub sampling fraction per-stratum* adalah :

$$n_i = 0,157 \times 91 = 14,32 \text{ (dibulatkan menjadi 14 orang)}$$

b. Untuk angkatan 2011.

$$F_i = \frac{180}{966} = 0,186$$

maka jumlah *sub sampling fraction per-stratum* adalah :

$$n_i = 0,186 \times 91 = 16,96 \text{ (dibulatkan menjadi 17 orang)}$$

c. Untuk angkatan 2012.

$$F_i = \frac{252}{966} = 0,261$$

maka jumlah *sub sampling fraction per-stratum* adalah :

$$n_i = 0,261 \times 91 = 23,74 \text{ (dibulatkan menjadi 24 orang)}$$

d. Untuk angkatan 2013.

$$F_i = \frac{382}{966} = 0,395$$

maka jumlah *sub sampling fraction per-stratum* adalah :

$$n_i = 0,395 \times 91 = 35,99 \text{ (dibulatkan menjadi 36 orang)}$$

6. Pengukuran Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Validitas adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Dengan kata lain, validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Tinggi rendahnya validitas suatu angket atau kuesioner dihitung dengan teknik Korelasi *Product Moment* dengan rumus sebagai berikut (Azwar, 1996:51) :

$$r_{XY} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2) - (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = koefisien korelasi product moment
- n = jumlah sampel
- X = skor pernyataan
- Y = skor total

b. Uji Realibilitas

Pengujian reliabilitas diperlukan untuk memastikan terlebih dahulu apakah data yang diperoleh secara relatif terbebas dari bias atau ketidakakuratan, akibat dari ketidakjelasan pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner. Apakah ada konsistensi jawaban apabila kuesioner tersebut dipakai kembali pada penelitian yang sama (berulang).

Realibilitas mengemukakan bahwa suatu alat ukur dikatakan relatif apabila hasil pengukuran terhadap alat tersebut mampu memberikan hasil yang relative tidak membedakan bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama (Azwar, 1996:66). Uji reliabilitas untuk menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama. Dalam menguji reliabilitas alat ukur peneliti menggunakan program komputer SPSS 12.

Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan menggunakan *Reliability Analysis Statistic* dengan *cronbach Alpha* (α). Jika nilai Cronbach Alpha (α) > 0,6 maka suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable (Ghozali, 2005:140). Rumus untuk menentukan realibilitas adalah :

$$\alpha = \frac{k \cdot r}{1 + (k - 1)r}$$

Dimana :

- α = Koefesien realibilitas
- r = Korelasi antar intem
- k = Jumlah item

c. Cara Pengukuran Data

Pengukuran dengan menggunakan quisioner dengan menggunakan skala likert yang penilaian terdiri dari :

- a. Jawaban sangat setuju diberi nilai 5
- b. Jawaban setuju diberi nilai 4
- c. Jawaban netral diberi nilai 3
- d. Jawaban tidak setuju diberi nilai 2
- e. Jawaban sangat tidak setuju diberi nilai 1

7. Teknik Analisis Data

1. Teknik Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara peubah respon (*variabel dependen*) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor (*variabel independen*). Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai atas.

Dalam penelitian ini teknik analisa regresi linear berganda adalah untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku terhadap niat mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk berjenjang karir di partai politik. Model hubungan nilai dengan variabel variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut (Iman Gozali, 2005:82) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n$$

Dimana :

- Y : Prilaku Mahasiswa
 β_1 : Koefesien regresi variabel X1
 β_2 : Koefesien regresi variabel X2
 β_3 : Koefesien regresi variabel X3
 X_1 : Variabel X1 (Sikap)
 X_2 : Variabel X2 (Norma subyektif)
 X_3 : Variabel X3 (Kontrol keprilakuan)

2. Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, hipotesis yang di gunakan adalah (Iman Gozali, 2005:84) :

Ho : Variabel-variabel bebas yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol keprilakuan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yakni prilaku mahasiswa

H_1 : Variabel-variabel bebas yaitu sikap, niat dan kontrol keprilakuan mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama sama terhadap variabel terikatnya.

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu (Iman Gozali, 2005:85):

- a. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- b. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

2. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X_1 , X_2 , X_3 (sikap, norma subyektif dan kontrol keprilakuan) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (prilaku mahasiswa) secara terpisah atau parsial.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

H_0 : Variabel-variabel bebas (sikap, norma subyektif dan kontrol keprilakuan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (prilaku mahasiswa).

H_1 : Variabel-variabel bebas (sikap, norma subyektif dan kontrol keprilakuan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (prilaku mahasiswa).

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu (Iman Gozali, 2005:85) :

- a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisa regresi dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi (R^2) nol variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, Selain itu koefisien determinasi (R^2) dipergunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).